

Sudirman Said:

Impor Beras Bukan Solusi

Tapi karena Malas Mencari Jalan Keluar

Selasa, 16 Januari 2018 | 7:32

<http://sp.beritasatu.com/home/sudirman-said-impor-beras-bukan-solusi-tapi-karena-malas-mencari-jalan-keluar/122299>



Sudirman Said [Stefy Thenu]

Berita Terkait

- Stok Mencukupi, Pemprov Banten Keberatan Kebijakan Impor Beras Pemerintah Pusat
- Sudirman Said Soal Biaya Pencalonan: Bukan Mahar, Tapi Saweran
- Pemerintah Jamin Ketersediaan BBM Selama Lebaran
- Beredar Kabar Menteri Sudirman Said Akan Mundur?
- Gubernur Gorontalo Dukung Penghentian Impor Beras

[SEMARANG] Pemerintah provinsi Jawa Tengah harus bersikap tegas menolak masuknya beras impor ke wilayahnya. Pasalnya, impor beras bukan saja menyusahkan, tapi juga mematikan petani.

"Pemprov harus tegas menolak. Kalau saya Gubernur, akan saya larang beras impor masuk Jateng, karena itu akan mematikan dan menyengsarakan petani Jateng," tegas Bakal calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said mene Dirman saat bersama Bacawagub Ida Fauziah bersilaturahmi dengan pimpinan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jateng di Semarang, Senin (15/1) sore.

Hal itu disampaikan Sudirman Said menyikapi rencana pemeritah melakukan impor beras guna menekan harga beras di pasar.

Sudirman mengakui, harga beras yang memberatkan masyarakat banyak memang harus segera dicarikan solusinya.

"Tetapi solusinya bukan dengan mendatangkan beras impor. Itu bukan solusi. Hal itu karena hanya malas berpikir dan bekerja mencari jalan keluar," tegasnya.

Ditegaskan, mengimpor beras sama dengan mematikan peluang bagi para petani untuk memproduksi beras. Petani selalu menjadi korban dari permainan para saudagar.

"Pemerintah harus turun tangan, kalau tidak mampu membantu meringankan, sekurang-kurangnya tidak menambah beban para petani. Impor beras itu menambah beban petani," tegasnya lagi.

Sudirman mengungkapkan, dari data yang dipelajarinya selama ini, Provinsi Jateng mampu mencukupi kebutuhan berasnya sendiri.

"Kalau sampai impor, ini ada yang tidak nyambung (mismatch) antara beras yang dibutuhkan masyarakat dengan stok Bulog," tukasnya.

Dikatakan, stok beras di Bulog dan kualitas berasnya harus disegarkan, harus dicek dan diperbaiki agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat mau membeli beras Bulog.

"Selera masyarakat meningkat sementara stok beras yang ada kualitasnya rendah," ujarnya.

Sudirman menegaskan, salah satu program kerjanya jika terpilih sebagai gubernur Jateng adalah memuliakan petani.

"Dengan melindungi petani maka Jateng akan selalu dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara swasembada," tandasnya. [142]

Stok Mencukupi,

Pemprov Banten Keberatan Kebijakan Impor Beras Pemerintah Pusat

Selasa, 16 Januari 2018 | 7:27



Ilustrasi beras impor. [www.liputan6.com]

- Sudirman Said: Impor Beras Bukan Solusi Tapi karena Malas Mencari Jalan Keluar
- Gubernur Gorontalo Dukung Penghentian Impor Beras
- Impor Beras Buktikan Pemerintah Gagal
- Sebut Data BPS Tak Dapat Dipercaya, JK Katakan Pemerintah Tetap Impor Beras
- Mentan: Indonesia 2015 Tidak Ada Impor Beras

[SERANG] Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak secara terang-terangan menolak kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat. Namun, Pemprov Banten hanya secara implisit berkeberatan dengan kebijakan impor beras, karena stok beras yang ada saat ini bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Banten untuk dua bulan lebih ke depan.

"Stok beras yang ada saat ini bisa mencukupi untuk kebutuhan 2,6 bulan ke depan. Itu artinya sampai dengan Maret 2018, stok beras di Provinsi Banten masih aman. Bahkan berdasarkan hasil kunjungan kami di lapangan dua minggu terakhir, para petani di sejumlah titik hampir setiap hari melakukan panen gabah. Jika dihitung hasil panen hingga Maret 2018, jumlah produksi beras di Provinsi Banten sebanyak 512.338 ton. Sementara konsumsi masyarakat Banten selama tiga bulan ke depan sebanyak 324.000 ton," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Agus M Tauchid ketika dihubungi SP, Senin (15/1) malam.

Menurut Agus, jika dibandingkan antara jumlah produksi dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Banten untuk tiga bulan ke depan, sebenarnya tidak akan mengalami masalah. Namun, persoalannya, Pemprov Banten sendiri atau pemerintah tidak memiliki barangnya. Sebab, para petani yang melakukan panen, gabahnya langsung dijual mengikuti mekanisme pasar.

"Persoalannya adalah Bulog sendiri tidak membeli gabah milik petani. Di samping itu, harga gabah kering panen di lapangan cukup tinggi mencapai Rp4.800-Rp5.500 per kg. Sementara harga pembelian pemerintah (HPP) hanya sebesar Rp3.750 per kg. Apakah karena persoalan harga tinggi itu, Bulog tidak mampu menyerap gabah petani? Seharusnya solusi jangka pendek yang perlu dilakukan adalah operasi pasar," ujar Agus.

Agus mengatakan, untuk jangka menengah dan jangka panjang, Pemprov Banten akan segera membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keberadaan BUMD nantinya akan ikut berperan untuk menampung gabah milik petani dengan harga yang wajar.

"Kami tidak mengharapkan adanya impor beras dari luar negeri karena akan merugikan petani. Apalagi, panen besar di Banten akan dimulai minggu kedua bulan Februari. Dan sekarang juga, hampir setiap hari ada spot-spot yang panen, angkanya sangat signifikan. Kami berkeyakinan, efek dari tingginya harga beras di pasar itu hanya sebentar," kata Agus.

Menurut Agus, kehadiran pemerintah lewat Bulog untuk membeli gabah petani sama sekali tidak ada karena harga pembelian pemerintah (HPP) hanya di angka Rp3.750 per kg. Padahal, di lapangan harga gabah kering panen milik petani sudah mencapai Rp5.500 per kg.

"Kalau Bulog hadir dengan membeli gabah petani di atas HPP, saya kira persoalan bisa ditanggulangi. Tapi faktanya, Bulog justru tidak mau membeli gabah dengan harga di atas HPP," katanya.

Lebih jauh Agus menjelaskan, tingginya harga beras karena panjangnya jalur distribusi. Gabah milik petani di Banten lebih banyak dijual ke Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya, gabah tersebut diolah menjadi beras di Karawang dan dijual kembali ke wilayah Banten.

"Kita tidak bisa melarang petani untuk menjual gabah ke luar daerah. Jual beli tidak bisa dibatasi oleh batas wilayah. Ini murni mekanisme pasar. Karena itu, Pemprov Banten akan segera membentuk BUMD yang khusus untuk menampung gabah petani. Harga gabah petani tetap terjaga dalam batas wajar dan harga beras juga demikian," ujarnya.

Menurut Agus, solusi mahalannya harga beras tidak perlu dengan impor tetapi memanfaatkan beras yang ada di daerah lain seperti Makassar yang katanya surplus beras.

"Jika di Bulog Banten mengalami stok beras yang menipis, bisa didatangkan dari daerah lain seperti Makassar sehingga persoalan bisa tertanggulangi," ujarnya. [149]